

PENERAPAN POLA SINERGITAS ANTARA BUMDES DAN UMKM DALAM MENGERAKKAN POTENSI DESA DI KECAMATAN SAPTOSARI

Muh. Rudi Nugroho

Dosen Ekonomi Syariah, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga

*Corresponding author

Muh. Rudi Nugroho

Email : Muhrudi82@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi bagi BUMDes dalam menggerakkan sektor UMKM di Desa Saptosari Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Sektor UMKM merupakan tonggak perekonomian bagi masyarakat Saptosari. Sebagai salah satu jalur destinasi wisata Gunungkidul, Desa Saptosari mempunyai potensi besar dalam mengembangkan skala usahanya. Namun permasalahannya, pelaku UMKM Di Saptosari masih banyak terhambat dalam hal permodalan, teknologi inovasi, keahlian tenaga kerja dan sistem pemasaran. Disisi lain keberadaan BUMDes bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari akar permasalahan UMKM dengan menggunakan metode *Root Cause Analysis* (RCA) kemudian merumuskan prioritas kebijakan yang harus diimplementasikan oleh BUMDes guna menggerakkan UMKM melalui metode *Analitycal Hierarki Process* (AHP). Implikasi akhir dari penelitian ini yakni terwujudnya tujuan BUMDes dalam menggerakkan perekonomian desa. Selain itu, dengan adanya program BUMDes yang mendukung UMKM diharapkan mampu meningkatkan skala usaha pelaku UMKM Desa Saptosari.

Keywords: BUMDes, UMKM, Pembangunan Ekonomi Desa.

Abstract

The study aims to formulate a strategy for BUMDes in moving the sector of Small Medium Enterprises (SME) in Saptosari village of Saptosari Subdistrict of Gunungkidul Regency. SME sector is a milestone for the community economy Saptosari. As one of the tourist destinations of Gunungkidul, Saptosari Village has great potential in developing its business scale. But the problem, the perpetrators still plenty of Saptosari village of SME hampered in terms of capital, technological innovation, workforce skills and marketing system. On the other hand the existence of BUMDes could be a solution to the problems faced by perpetrators of SME. In this study, researchers will be looking for the roots of the problem of SME using Root Cause Analysis (RCA) and then formulate the policy priorities that should be implemented by BUMDes in order to build the SME through Analitycal method Hierarchy Process (AHP). The implications of the end of the study i.e. materialize the goal of BUMDes in moving the economy of the village. In addition, the existence of the program BUMDes which support SME is expected to increase the business scale offender SMEC Village Saptosari.

Keywords: BUMDes, Small Medium Enterprises, Economic Development Of The Village.

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri peran Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Tidak hanya berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, UMKM juga terbukti mampu bertahan dan menjalankan perannya dengan baik ditengah terjadinya krisis multidimensi. Hal ini cukup beralasan mengingat sektor usaha kecil menengah memiliki prospek yang lebih tinggi untuk dikembangkan, selain itu UMKM juga memiliki karakteristik yang berbeda jika dibanding dengan jenis usaha besar. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada skala usaha, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi, akan tetapi juga tingkat ketahanan usaha, dimana UMKM diyakini lebih tangguh dan mempunyai ketahanan lebih dalam menjalankan usahanya (Wijaya, 2008).

Di Desa se Kecamatan Saptosari sendiri, UMKM telah menjadi tonggak perekonomian masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat bahwa 90% dari masyarakat Desa Saptosari merupakan pelaku UMKM. Meskipun pada kenyataannya sebagian besar usaha UMKM masih berjalan ala kadarnya dan masih skala rumah tangga, namun tidak dapat dipungkiri jika sektor UMKM ini sangat berperan bagi perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan data publikasi Gunungkidul dalam angka tahun 2017, tercatat di Desa Krambisawit terdapat UMKM sebanyak 172 UMKM. Hal ini tentunya tidak mengherankan, mengingat Desa Saptosari ini merupakan salah satu desa jalur destinasi wisata pantai Gunungkidul. Status Gunungkidul sebagai pusat destinasi wisata ini memberikan peluang tersendiri bagi Desa Saptosari untuk mengembangkan skala usahanya menjadi lebih besar.

Namun disisi lain, UMKM juga banyak menghadapi permasalahan. Diantara permasalahan yang terjadi di Desa Saptosari ini yaitu terbatasnya sumber permodalan yang dapat diakses oleh masyarakat setempat, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan kurangnya pengetahuan teknologi inovasi dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM yaitu keterkaitan dengan kurang jelasnya prospek usaha dan perencanaan, serta belum mantapnya visi dan misi UMKM. Mayoritas UMKM yang ada di Desa Saptosari pada umumnya masih bersifat *income gathering* yaitu untuk meningkatkan pendapatan. Karakteristik ini dapat dilihat dari perilaku UMKM yang umumnya merupakan usaha milik keluarga, penggunaan teknologi yang relatif sederhana, akses permodalan terbatas, tidak *bankable* dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan modal pribadi.

Dari berbagai permasalahan tersebut, sebenarnya desa sendiri memiliki sumber kekuatan baik secara moril maupun materil. Diantara sumber

kekuatan tersebut, keberadaan BUMDes sebenarnya bisa menjadi solusi bagi semua permasalahan yang terjadi pada UMKM di Desa Saptosari. Sebagaimana yang telah di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 213 ayat 1, yang mana menyatakan bahwa desa dapat membentuk badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Sehingga dengan melihat potensi UMKM yang ada di Desa Saptosari, sudah semestinya jika keberadaan BUMDes lebih di fokuskan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa khususnya UMKM. Hal ini dikarenakan potensi utama di desa tersebut berada di sektor UMKM.

Guna mencapai tujuan dalam mengembangkan potensi ekonomi desa, tentunya BUMDes juga harus dikembangkan terlebih dahulu, baik dari pengembangan operasional maupun manajemen tata kelola BUMDes. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mencari strategi dan prioritas kebijakan dalam mengembangkan BUMDes guna menggerakkan UMKM di Desa Saptosari Kecamatan Saptosari.

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dimana data diperoleh melalui proses wawancara langsung kepada pelaku UMKM dan pihak-pihak yang bersangkutan baik pengurus BUMDes maupun pemerintah desa. Sebelum model pendampingan antara BUMDes dan UMKM Desa diterapkan dilakukan langkah-langkah pemetaan antara lain dengan menggunakan metode *Root Cause Analysis (RCA)* dan *Analytical Hierarchy Proses (AHP)*. Dimana dengan menggunakan model ini, nantinya akan menghasilkan prioritas kebijakan yang harus dilakukan BUMDes dalam mengembangkan dan menggerakkan UMKM Desa di Saptosari.

Secara teknis RCA dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menganalisis hasil jawaban dari responden. Dimana hasil jawaban ini dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Hasil jawaban dari kuesioner pra-diskusi, yaitu hasil kuesioner sebelum didiskusikan lebih lanjut dengan informan dan peneliti lapangan. Hasil ini masih bersifat sementara dan belum dikroscek dan diperdalam melalui diskusi lanjutan dalam rangka pendalaman.
2. Hasil jawaban atau temuan kesepakatan pada saat diskusi. Hasil ini kemudian dikembangkan oleh peneliti untuk, menjadi RCA tahap 2.

Setelah dilakukan pengolahan data melalui program *expert choice*, kemudian dapat ditemukan hasil skala prioritas untuk mencapai sasaran "penentuan prioritas pengembangan BUMDes dalam menggerakkan UMKM Desa di Saptosari". Urutan skala prioritas ini sesuai dengan nilai atau bobot dari masing-masing alternatif dan kriteria serta besarnya konsistensi gabungan

berdasarkan hasil *running*. Apabila besarnya konsistensi tersebut $\leq 0,1$ maka keputusan yang diambil oleh para responden untuk menentukan skala prioritas cukup konsisten. Jika dikatakan cukup konsisten maka prioritas tersebut bisa diimplementasikan.

Penelitian terkait pengembangan UMKM ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Tambunan (2003), menurutnya karakteristik dan dinamika perekonomian yang baik dengan laju perekonomian yang tinggi di negara-negara asia timur dan tenggara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura adalah kinerja UMKM. Di Negara-negara tersebut, UMKM mempunyai kinerja yang sangat efisien, produktif, dan memiliki daya saing tinggi. Selain itu UMKM juga sangat responsif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahnya dalam membangun sektor swasta dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekspor.

Sedangkan dalam kajian UMKM yang dilakukan oleh Jaka (2010) diperoleh beberapa masalah yang dihadapi UMKM di Kabupaten Bantul Provinsi DIY, antara lain: (i) pemasaran, (ii) modal dan pendanaan, (iii) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, (iv) pemakaian bahan baku, (v) peralatan produksi, (vi) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, (vii) rencana pengembangan usaha, dan (viii) kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk mengatasi segala permasalahan UMKM tentu saja tidak hanya dibebankan kepada pelaku UMKM, namun harus memperoleh dukungan dari seluruh *stakeholder*. Baik dukungan dari asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, maupun dinas/ instansi terkait di lingkungan pemerintahan daerah. Disamping itu diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UMKM.

Adapun teori yang digunakan untuk membangun analisis dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sedangkan menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Hal ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Tama (2012), pengelolaan BUMDes sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa, sehingga memunculkan konsep dari desa, oleh desa, untuk desa. Adapun cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha.

Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta didasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Hal ini menjadi penting karena profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kesepakatan masyarakat banyak (*member-base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar (*self-help*) (Rahrdjo dan Ludigdo, 2006).

Menurut Maryuni (2008), ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial yaitu modal usaha BUMDes 51% berasal dari desa, dan 49% berasal dari masyarakat. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama oleh masyarakat. Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan serta berakar pada tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat (*local wisdom*). Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Tenaga kerja yang diberdayakan merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa, adapun keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Teori Kelembagaan dan Prinsip Tata Kelola BUMDes

Menurut Al Kahfi (2014), definisi kelembagaan dapat dilihat dari dua klasifikasi. Jika dilihat dari prosesnya, kelembagaan merupakan upaya merancang pola interaksi antara pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan sendiri mempunyai tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan politik dan sosial antara pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi.

BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa, tentunya membutuhkan tata kelola manajemen BUMDes yang tersusun dan mampu bersaing serta membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga untuk menjadi institusi yang baik, BUMDes harus memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan dengan adanya struktur organisasi.

Adapun prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes menurut Ridwan (2014), antara lain yaitu: (1) kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam mengelola BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik; (2) partisipatif, keseluruhan komponen ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes; (3) emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) transparan, seluruh kegiatan dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum, harus terbuka dan seluruh lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) akuntabel, keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan; (6) sustainable, melakukan pengembangan berkelanjutan.

3. Teori Pengembangan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Menurut Rahman (2009) UMKM telah menunjukkan perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi. Adapun peranan UMKM dalam bidang sosial, yakni UMKM mampu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Tidak hanya berperan dalam menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, UMKM juga mampu menyediakan barang dan jasa untuk konsumen berdaya beli tinggi seperti di perkotaan. Selain itu UMKM juga diyakini mempunyai rantai pemasaran yang kompleks, bahkan mampu menyongkong keberlangsungan usaha besar dan menengah.

Menurut Afiduddin (2010), pengembangan UMKM yang tepat agar menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing maka UMKM lebih diarahkan kepada ketahanan pelaku ekonomi dalam menghadapi daya saing dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, diperlukan upaya hal-hal seperti: (a) penciptaan iklim usaha; (b) bantuan permodalan; (c) perlindungan usaha; (d)

pengembangan kemitraan; (e) pelatihan; (f) mengembangkan promosi; dan (g) mengembangkan kerjasama (Hahsah, 2004).

PEMBAHASAN

Identifikasi Akar Permasalahan Pengembangan UMKM Desa Di Saptosari

Adanya peran BUMDes dalam menggerakkan perekonomian desa sangatlah penting. Sehingga tidak heran jika dalam hal ini pemerintah mewajibkan setiap desa untuk memiliki BUMDes. Meskipun pada faktanya keberadaan BUMDes di desa-desa hanya sebagai formalitas saja, akan tetapi belum ada peran aktif dalam mewujudkan tujuan awal dibentuknya BUMDes. Oleh sebab itu, adanya penelitian terkait pengembangan BUMDes akan terus dibutuhkan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa se Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, keberadaan BUMDes belum bisa mendukung perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan masih belum adanya tenaga profesional yang turut serta dalam pengelolaan BUMDes. Sangat terlihat sekali antara BUMDes dan UMKM masih berjalan masing-masing. Adapun dana desa yang ada selama ini belum dikelola untuk pengembangan potensi ekonomi wilayah setempat. Padahal tujuan adanya dana desa salah satunya adalah untuk memajukan perekonomian pedesaan. Maka dari itu adanya pembinaan BUMDes sangat diperlukan. Agar mampu berperan aktif dalam memajukan ekonomi desa, maka BUMDes harus mempunyai strategi dalam menggerakkan UMKM Desa Saptosari.

Setelah melihat kondisi UMKM di Desa Saptosari, peneliti menggolongkan 3 aspek permasalahan yang terjadi dalam UMKM. Adapun ketiga aspek tersebut antara lain yaitu: (i) aspek input; (ii) aspek proses; (iii) aspek output. Aspek-aspek tersebut merupakan satu rangkaian yang mempresentasikan kondisi sebuah entitas usaha. Persoalan dalam ketiga aspek tersebut juga merupakan pijakan untuk melihat sejauh mana pelaku UMKM Desa Saptosari dapat menghadapi hambatan usaha yang ada.

Aspek input adalah terkait dengan aksesibilitas bahan baku, yaitu sejauh mana pelaku UMKM dapat mengakses bahan baku. Beberapa komponen yang terkait dengan bahan baku adalah akses bahan dasar produksi dan akses ketenagakerjaan. Sementara aspek proses adalah terkait dengan proses produksi atau proses pelayanan jasa. Jika sebuah pelaku usaha semakin efisien dan efektif, maka kemungkinan besar proses produksi yang dihasilkan juga akan semakin optimal. Beberapa komponen yang terkait dengan aspek proses adalah ketersediaan teknologi inovasi sebagai komponen penting dalam output adalah terkait dengan produk

barang atau jasa yang dihasilkan serta bagaimana pelaku usaha yang bersangkutan dapat memasarkannya. Ketika tingkat akseibilitas pemasaran semakin baik, maka kemungkinan besar produk atau jasa yang dihasilkan dapat dengan mudah terserap oleh pasar.

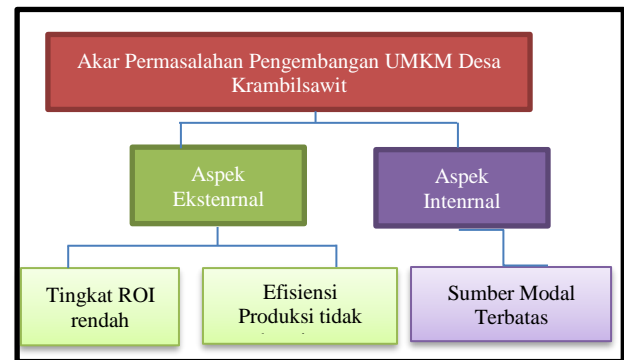
Pemilihan aspek input, proses dan output dalam penelitian ini didasarkan pada teori sektoral, bahwa setiap pelaku usaha pasti menghadapi hambatan usaha yang menyangkut pada perolehan bahan baku, proses produksi atau pelayanan jasa, dan pemasaran. Ketika tingkat permasalahan di ketiga aspek tersebut semakin besar dan pelaku usaha yang bersangkutan sulit dalam meminimalisir permasalahan yang ada, maka besar kemungkinan pelaku usaha tersebut akan sulit berkompetisi dalam sebuah arena pasar karena mempunyai daya saing yang lemah. Begitupun jika sebuah pelaku usaha mempunyai kapasitas yang baik dalam meminimalisir permasalahan yang ada, maka besar kemungkinan pelaku usaha tersebut mempunyai daya saing yang baik dan bisa berkompetisi pada arena pasar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pelaku UMKM Desa Saptosari, maka secara umum terdapat berbagai permasalahan pelaku UMKM Desa Saptosari. Adapun permasalahan tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

1. Aspek Lingkungan Usaha
 - Keterbatasan akses permodalan sehingga menghambat upaya ekspansi.
2. Akses Akseibilitas Bahan Baku
 - Sering terjadi kenaikan harga bahan baku dan ketergantungan yang tinggi pada jenis bahan baku utama (daya substitusi yang rendah).
 - Tidak mempunyai strategi dalam memperoleh informasi pasar bahan baku, dimana masih terjadi informasi asimetris dalam mencari harga bahan baku yang paling murah.
 - Terkadang terjadi lonjakan permintaan produk, tetapi pasokan bahan baku sering diskontinue, sehingga terjadi potensi kehilangan profit.
 - Volume pembelian bahan baku yang terlalu kecil dan inkonsisten, sehingga tidak mencapai skala ekonomi yang optimum.
3. Aspek Proses Produksi
 - Tingkat efisiensi produksi yang masih rendah karena rendahnya skala produksi rata-rata UMKM, khususnya jenis sektor industri pengolahan.
 - Kurangnya pengetahuan seputar diferensiasi produk.
 - Pengelolaan manajemen produksi yang rendah, khususnya dalam manajemen *quantity* dan *quality control*.
 - Rendahnya kadar penggunaan teknologi yang efisien dalam proses produksi.

- Nilai tambah hasil produksi belum optimum.
4. Aspek Akseibilitas Pemasaran
 - Rendahnya jaringan pemasaran, sehingga daya edar produk cenderung lambat dan mayoritas persebarannya hanya di wilayah desa dan kecamatan.
 - Tidak mempunyai strategi dalam memperoleh informasi pemasaran yang baik.
 - Tata niaga yang tercipta belum efisien dan cenderung asimetris.
 - Hubungan dengan tenaga pemasar tidak terpantau dengan baik.
 - Keterbatasan informasi yang dimiliki tentang peluang pasar luar daerah, utamanya ekspor.

Berdasarkan poin-poin permasalahan di atas, maka dapat dibuatkan bagan analisa akar permasalahan pengembangan UMKM Desa Saptosari sebagai berikut:



Gambar 1. Akar Masalah Pengembangan UMKM Desa Saptosari

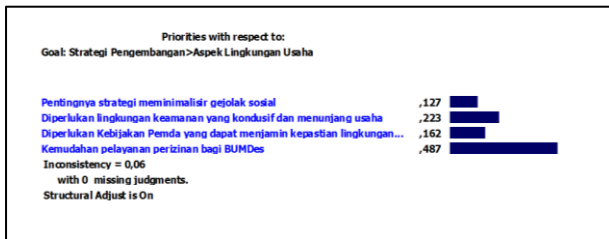
Sumber: Hasil Ilustrasi Lapangan

Rancangan Prioritas Kebijakan Strategi BUMDes Dalam Menggerakkan UMKM Desa Saptosari.

Rancangan prioritas kebijakan dalam pengembangan UMKM ini didasarkan pada analisa AHP (*Analytical Hierarchy process*) yang didapat dari informan yang berstatus sebagai pelaku usaha sekaligus beberapa informan akademisi. Khusus kuesioner AHP, pelaku usaha yang dimaksud adalah mereka yang benar-benar paham mengenai situasi dan kondisi internal dan eksternal lingkungan usaha di Desa Saptosari. Kriteria yang dipakai adalah lama usaha, omset, dan kemampuan berfikir informan yang menurut peneliti masuk dalam kategori ahli. Jika informan dari pelaku usaha yang dimaksud dinilai tidak masuk kriteria *expert*, maka informan tersebut hanya dimasukkan dalam informan RCA. Setelah analisis AHP dilakukan, peneliti kemudian merancang strategi BUMDes dalam mengembangkan UMKM di Desa Saptosari, serta menumbuhkan potensi-potensi usaha baru yang kedepannya mampu mengembangkan perekonomian daerah setempat.

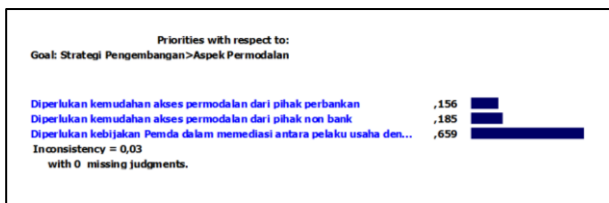
Rancangan prioritas kebijakan strategi BUMDes dalam mengembangkan UMKM Desa Saptosari di dasarkan pada kondisi UMKM yang ada di desa tersebut. Berdasarkan kondisi UMKM Desa Saptosari, prioritas kebijakan kemudian dipilah menjadi empat aspek seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: (i) aspek lingkungan usaha; (ii) aspek aksesibilitas bahan baku, (iii) aspek proses produksi; (iv) aspek aksesibilitas pemasaran. Dari keempat aspek tersebut masih bersifat makro, sehingga peneliti memilah kembali aspek-aspek tersebut menjadi lima aspek yang lebih rinci, yaitu (i) aspek lingkungan usaha (budaya, sosial, politik, dan keamanan) ; (ii) aspek permodalan; (iii) aspek ketenagakerjaan; (iv) aspek teknologi inovasi; (v) aspek pemasaran. Prioritas kebijakan strategi pengembangan UMKM Desa Saptosari berdasarkan kelima aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Kebijakan dari Aspek Lingkungan Usaha
Berdasarkan analisa AHP, prioritas kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki aspek lingkungan usaha menurut pelaku UMKM adalah pentingnya kemudahan pelayanan perizinan bagi BUMDes.



Gambar 2. Prioritas Kebijakan dari Aspek Lingkungan Usaha
Sumber: *Expert Choice, 2018*

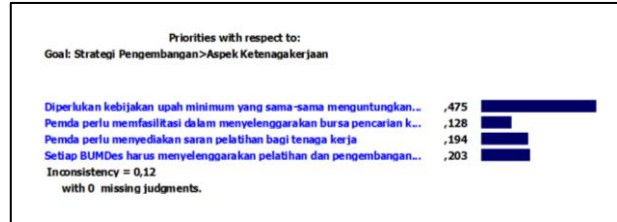
2. Prioritas Kebijakan dari Aspek Permodalan
Berdasarkan analisa AHP, prioritas kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki aspek aksesibilitas permodalan menurut pelaku UMKM adalah diperlukan adanya kebijakan Pemda dalam memediasi antara pelaku usaha dengan pihak yang menyediakan permodalan.



Gambar 3. Prioritas Kebijakan dari Aspek Permodalan
Sumber: *Expert Choice, 2018*

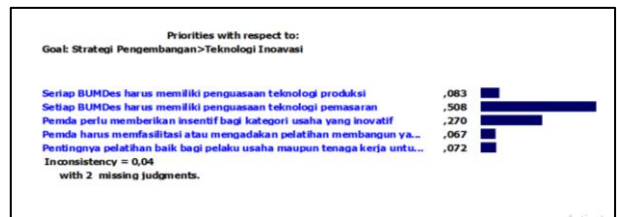
3. Prioritas Kebijakan dari Aspek Ketenagakerjaan

Berdasarkan analisa AHP, prioritas kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki aspek ketenagakerjaan menurut pelaku UMKM adalah diperlukannya kebijakan upah minimum yang sama-sama menguntungkan pelaku usaha dan pekerja.



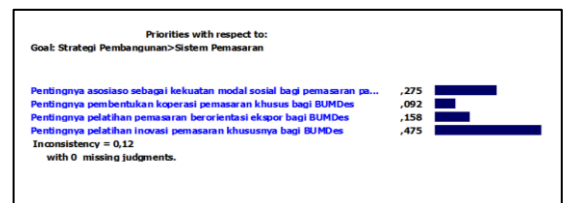
Gambar 4. Prioritas Kebijakan dari Aspek Ketenagakerjaan
Sumber: *Expert Choice, 2018*

4. Prioritas Kebijakan dari Aspek Teknologi Inovasi
Berdasarkan analisa AHP, prioritas kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki aspek teknologi inovasi menurut pelaku UMKM adalah setiap pelaku usaha harus mempunyai penguasaan teknologi pemasaran.



Gambar 5. Prioritas Kebijakan dari Aspek Teknologi Inovasi
Sumber: *Expert Choice, 2018*

5. Prioritas Kebijakan dari Aspek Pemasaran
Berdasarkan analisa AHP, prioritas kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki aspek akses pemasaran menurut pelaku UMKM adalah pentingnya pelatihan inovasi pemasaran khususnya bagi BUMDes.



Gambar 6. Prioritas Kebijakan dari Aspek Pemasaran
Sumber: *Expert Choice, 2018*

Berdasarkan hasil analisa prioritas kebijakan pada masing-masing aspek di atas, maka dapat direkapitulasi prioritas kebijakan secara umum pada masing-masing aspek, yaitu mulai dari aspek lingkungan usaha, aspek permodalan, aspek ketenagakerjaan, aspek teknologi inovasi, dan

aspek pemasaran. Prioritas secara umum ini diambil dari tingkat frekuensi kebijakan yang sering disebut oleh responden. Prioritas kebijakan pada lima aspek dalam rangka menyusun strategi BUMDes dalam mengembangkan UMKM Desa Saptosari adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Kebijakan dari Aspek Lingkungan Usaha
Pada aspek lingkungan usaha terdapat 3 kebijakan prioritas yang harus diambil BUMDes dalam rangka mengembangkan UMKM Desa Saptosari, yaitu:
 - a. Prioritas pertama adalah diperlukan kemudahan pelayanan perizinan bagi BUMDes.
 - b. Prioritas kedua adalah pentingnya menjaga lingkungan keamanan yang kondusif dalam menunjang perkembangan usaha.
 - c. Prioritas ketiga adalah diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang dapat menjamin kepastian lingkungan sosial yang kondusif.
2. Prioritas Kebijakan dari Aspek Permodalan
Pada aspek permodalan, terdapat tiga kebijakan prioritas yang harus diambil BUMDes dalam rangka mengembangkan UMKM Desa Saptosari, yaitu:
 - a. Prioritas pertama adalah diperlukan adanya kebijakan Pemda dalam memediasi antara pelaku usaha dengan pihak yang menyediakan permodalan.
 - b. Prioritas kedua adalah diperlukan kemudahan akses permodalan dari pihak non bank kepada pelaku usaha.
 - c. Prioritas ketiga adalah diperlukan kemudahan akses permodalan dari pihak perbankan kepada para pelaku usaha.
3. Prioritas Kebijakan dari Aspek Ketenagakerjaan
Pada aspek ketenagakerjaan, terdapat tiga kebijakan prioritas yang harus diambil BUMDes dalam rangka mengembangkan UMKM Desa Saptosari, yaitu:
 - a. Prioritas pertama adalah diperlukan kebijaka upah minimum yang sama-sama menguntungkan pelaku usaha dan pekerja.
 - b. Prioritas kedua adalah pemda perlu menyediakan sarana pelatihan bagi para pekerja.
 - c. Prioritas ketiga adalah seluruh BUMDes harus menyediakan pelatihan bagi seluruh anggotanya.
4. Prioritas Kebijaka dari Aspek Teknologi Inovasi
Pada aspek teknologi inovasi, terdapat dua kebijakan prioritas yang harus diambil BUMDes dalam rangka mengembangkan UMKM Desa Saptosari, yaitu:
 - a. Prioritas pertama adalah setiap pelaku usaha mempunyai penguasaan teknologi pemasaran.

- b. Prioritas kedua adalah Pemda perlu memberikan insentif bagi pelaku usaha yang inovatif.

5. Prioritas Kebijakan dari Aspek Pemasaran
Pada aspek pemasaran, terdapat dua kebijakan prioritas yang harus diambil BUMDes dalam rangka mengembangkan UMKM Desa Saptosari, yaitu:
 - a. Prioritas pertama adalah pentingnya pelatihan inovasi pemasaran khususnya bagi pelaku BUMDes.
 - b. Prioritas kedua adalah pentingnya asosiasi sebagai kekuatan modal sosial bagi pelaku usaha.

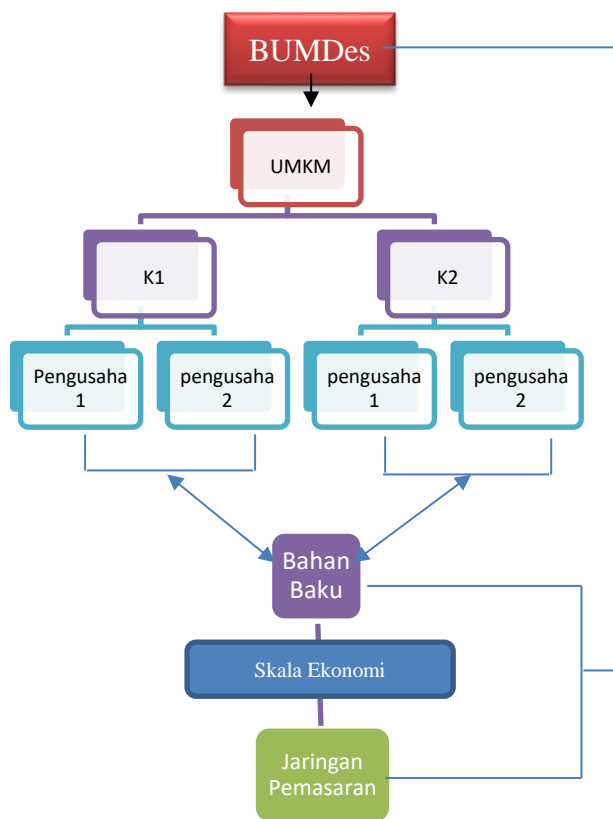
Strategi BUMDes dalam Menggerakkan UMKM Desa Saptosari.

Tidak dapat dipungkiri BUMDes mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Sehingga pengelolaan BUMDes harus benar-benar diperhatikan dan tidak bisa disepelekan begitu saja. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak BUMDes yang kurang memperhatikan sistem operasional dan manajemen perencanaan usahanya. Padahal adanya sistem yang baik tentu saja akan memberikan dampak yang baik pula bagi entitas usaha.

Sebagai langkah awal dalam mengembangkan UMKM, terlebih dahulu BUMDes menggolongkan UMKM yang ada ke dalam beberapa klaster. Dimana dalam satu klaster ini nanti diisi oleh UMKM yang mempunyai jenis produk yang sama. Tujuan dari adanya pembentukan klaster ini adalah untuk mempermudah UMKM dalam menjangkau bahan baku serta menjangkau target pasar. Dalam proses hulu, yakni dalam hal perolehan bahan baku, adanya klaster-klaster ini akan memberikan solusi bagi para pelaku UMKM dalam menghadapi permasalahan mahalanya bahan baku pendukung. Dengan adanya klaster UMKM, pelaku usaha bersama-sama akan melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah banyak (sistem pembelian tanggung renteng). Sistem tanggung renteng disini yakni anggota akan membuat asasosiasi pengumpulan modal guna pembelian bahan baku. Anggota akan membayar bahan baku sesuai dengan jumlah yang dibeli, dengan kata lain sebenarnya dalam proses pembelian bahan baku tidak ada yang berubah. Hanya saja supaya memperoleh harga yang lebih murah, maka anggota membeli bahan baku secara bersama-sama dalam jumlah banyak. Dengan pembelian bahan baku dalam jumlah banyak inilah nantinya akan menekan biaya produksi.

Selain itu, pembentukan kluster ini juga mempermudah BUMDes dalam memberikan pendampingan dan evaluasi kinerja UMKM. Tentu

saja pembentukan kluster ini juga akan sangat menguntungkan bagi UMKM, hal ini karena dengan adanya sistem kluster akan membantu UMKM dalam mencapai proses produksi yang efektif dan efisien, yang nantinya akan berdampak pada terpenuhinya skala ekonomi. Mengapa skala ekonomi ini penting? Hal ini dikarenakan apabila skala ekonomi terpenuhi, maka UMKM akan lebih mudah dalam memperluas jaringan pemasarannya.



Gambar 7. Strategi Awal Implementasi Kebijakan Sinergi BUMDes - UMKM
Sumber: Ilustrasi Penulis, 2018

Setelah kluster UMKM terbentuk maka selanjutnya BUMDes melaksanakan pelatihan skill terhadap pelaku UMKM. Pelatihan pelaku UMKM penting digunakan untuk meningkatkan skill, pengetahuan serta kreatifitas SDM. Pelatihan tidak cukup jika hanya dilakukan satu atau dua kali, tapi harus masiv. Pada UMKM Desa Saptosari sebenarnya produk usaha yang ada sudah beraneka ragam, akan tetapi yang menjadi masalah proses produksi

yang belum efisien. Hal ini dikarenakan mayoritas UMKM masih menggunakan metode produksi tradisional/ manual. Oleh sebab itu, pelatihan tahap awal yang dilakukan di Desa se Saptosari yaitu pelatihan penggunaan teknologi produksi pembuat keripik dan pelatihan *packaging*.



Gambar 8. Pemberian Alat Bantu Produksi Keripik Ketela

Disitu pelaku UMKM diberikan bantuan alat berupa pengering keripik pasca goreng serta diberikan pula alat *packaging*. Kemudian dengan alat-alat tersebut, para pelaku UMKM diajari bagaimana cara penggunaan alat, cara mengurus manajemen produksi, cara menginovasi produk agar lebih menarik, hingga cara *packaging*. Selain produk keripik pathilo, pelatihan lain yang sudah berjalan yaitu pelatihan pembuatan sabun cuci dari Abu. meskipun sudah banyak kemas sabun cuci dengan beraneka ragam merek yang beredar, namun produk khas daerah tentu saja mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Selain itu keunggulan lain sabun cuci ini yaitu ramah lingkungan.



Gambar 9. Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci

Dari pelatihan pertama tersebut menghasilkan hasil akhir produk olahan khas Saptosari yaitu Kerupuk Pathilo. Jika pada umumnya kerupuk pathilo ini dijual masih dalam bentuk mentah, maka disini BUMDes mengajak masyarakat untuk menginovasi produk tersebut menjadi produk siap santap dengan ukuran yang sekali lahap (bentuk umumnya lebar) dan disajikan dalam kemasan yang lebih menarik. Eksistensi kerupuk pathilo sebagai jajanan ndeso nyatanya setelah disajikan dalam bentuk yang berbeda dan di *packing* sedikit lebih rapi menjadikan produk tersebut lebih digemari.



Gambar 10. Produk Pathilo Khas Saptosari

Sebagai tahap lanjutan guna menggapai pasar baru, BUMDes bekerjasama dengan seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Gunung Kidul bersama-sama mengadakan pameran produk UMKM melalui pengadaan Festival Pantai Selatan. Pada acara ini, masing-masing desa akan mengeluarkan produk khas daerahnya masing-masing. Mengapa acara ini di adakan di pantai, hal ini bertujuan untuk memancing para wisatawan untuk mengetahui produk unggulan dari masing-masing desa. Pengenalan produk oleh-oleh khas ini merupakan langkah awal dalam memperluas jaringan pemasaran produk UMKM.

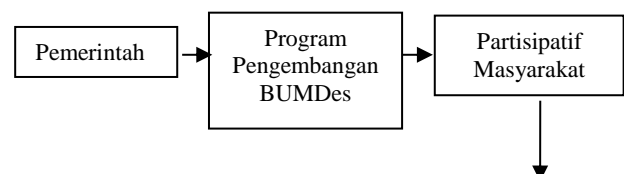


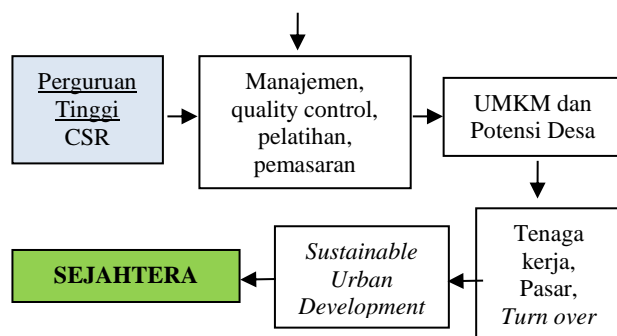
Gambar 11. Pameran Produk UMKM pada Acara Festival Pantai Selatan Saptosari

Dalam proses pemasaran, peran BUMDes adalah memberikan akses pasar yang lebih luas. Selama ini produk Desa Saptosari masih beredar dalam lingkup kecamatan, sehingga disini BUMDes harus bisa memberikan akses pemasaran produk bagi pelaku UMKM. Harusnya pemasaran produk untuk produk Saptosari ini tidaklah susah, mengingat Desa Saptosari merupakan salah satu akses jalur wisata Gunungkidul, tentu saja potensi pengembangan produk-produk UMKM khas Saptosari sangatlah besar.

Adapun yang menjadi perhatian penting dalam memperluas pemasaran ini yakni dengan meningkatkan daya saing produk, utamanya meningkatkan kualitas produk baik dari segi tampilan produk maupun dari bentuk *packaging* produk yang lebih menarik. Adanya inovasi-inovasi produk asli Saptosari, seperti gapek, patilo, dan aneka kripik juga bisa menjadi daya saing sendiri. Sebagai contoh misalnya dengan membuat inovasi patilo yang siap makan dengan ukuran sekali lahap dan dengan pilihan rasa bervariasi. Atau dengan membuat aneka olahan gapek khas Saptosari, baik dalam bentuk tiwul Instan aneka rasa dengan warna-warna yang lebih menarik atau olah gapek seperti gatot instan.

Beberapa langkah dalam mendukung pola sinergitas yang telah diterapkan antara BUMDES dan UMKM Desa di Saptosari, perlu ditingkatkan lagi kerjasama dengan pihak lain salah satunya adalah Perguruan tinggi dengan melalui program pengabdian masyarakat. Kerjasama dengan perguruan tinggi ini dibutuhkan khususnya dalam meningkatkan kualitas produk dan manajemen BUMDES serta UMKM serta dalam memperluas akses dan model pemasaran produk UMKM. Sehingga diharapkan dengan adanya sinergitas BUMDES, UMKM dan Perguruan Tinggi akan meningkatkan masyarakat Desa Di Saptosari. jika disimulasikan dalam diagram sebagai berikut:





Dengan terwujudnya sinergitas antar lembaga maka terwujudlah iklim usaha yang kondusif dan menjanjikan bagi pelaku UMKM Desa di Saptosari, kedepannya pemerintah daerah bisa turut serta berpartisipasi melalui perumusan kebijakan yang mendukung pelaku UMKM dan BUMDes. Selain kebijakan, pemerintah juga harus bisa membantu BUMDes dalam memediasi antara UMKM dan penyedia modal, sehingga kebutuhan permodalan UMKM bisa terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa prioritas kebijakan dari semua aspek, maka dirumuskan bahwa UMKM merupakan tonggak utama perekonomian Desa Saptosari. Untuk mengembangkan sektor tersebut diperlukan adanya integrasi antara pemerintah daerah, penyedia permodalan, dan peran BUMDes dalam mendukung dan membantu memenuhi kebutuhan UMKM dalam menjalankan usahanya. Adanya prioritas kebijakan ini, harapannya bisa menjadi acuan dasar pengurus BUMDes Desa Saptosari guna mengembangkan UMKM. Secara keseluruhan prioritas kebijakan utama yang harus ditempuh BUMDes untuk mengembangkan UMKM Desa Saptosari antara lain yaitu; (i) adanya kemudahan pelayanan perizinan untuk BUMDes; (ii) adanya kebijakan pemerintah daerah dalam memediasi antara pelaku usaha dengan pihak penyedia permodalan; (iii) adanya kebijakan upah minimum yang menguntungkan bagi pelaku usaha dan pekerja; (iv) mengadakan pelatihan teknologi hasil produk; dan (v) mengadakan pelatihan inovasi pemasaran.

PUSTAKA

- Arifin, Imamul, Giana Hadi W. (2009). *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama.
- Arsyad, Lincollin. (2010). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- _____. 2015. *Ekonomi Pembangunan Edisi kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Baskara, I Gede Kajeng. "Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia". *Jurnal. Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 2. Hlm. 114-125.

- Budiono, Puguh. 2015. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor)". *Jurnal. Jurnal Politik Muda*, Vol.4 No.1, Januari-Maret 2015, 116-125.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri)*. Jakarta: Indeks.
- Glasson, T. (1977). *Pengantar Perencanaan Regional (terjemahan)*. Jakarta: LPFEUI
- Gunawan, Ketut. 2011. "Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi". *Jurnal. WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi* Vol. 10 No. 3 April 2011.
- Irawan, Dedik dkk. 2013. "Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Analysis of The Development Strategy of Rural Islamic-Microfinance Institutions: Case Study at Al Hasanah BMT)". *Jurnal. JIIA*, Vol. 1, No. 1.
- Nurawami, Shofia., 2013 "Peranan Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Kredit terhadap Pendapatan Kotor UKM Rumah Tangga setelah menjadi Kreditur". *Jurnal. Jurnal Studi Kasus BMT Muamalat*.
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto dan Suwondo. 2012. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)". *Jurnal. Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076.
- Samadi, Arrafiqur Rahman dan Afrizal. 2012. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*.
- Tama, Dantika Ovi Era dan Yanuardi. 2012. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*. *Human Development Report (HDR)*. 2011. United Nations Development Program.
- Komara, Eko Kurniawan. 2015. *Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bagi Masyarakat (Telaah Kajian Manfaat Keberadaan BUM Desa 'Hanyukupi' Ponjong dan BUM Desa 'Sejahtera' Bleberan di Kabupaten Gunungkidul)*. Yayasan Penabulu.
- Kusuma, Gabriella Hanny. 2016. *BUMDes: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo)*. Penabulu Foundation.
- Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal. 2016. *Pendekatan Utuh Penguat Kelembagaan Ekonomi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.